

**PERANAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA UNTUK  
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PEMBANGUNAN FISIK DESA**

**(Studi Desa Pendere Saril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**IWAN PURNAMA**

**13 851 0007**

**STUDI ILMU KEPERINTAHAN**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2017**

**PERANAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA UNTUK  
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PEMBANGUNAN FISIK DESA**

**(Studi Desa Pendere Saril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**IWAN PURNAMA**

**13 851 0007**

*Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Menyelesaikan Studi S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area*

**STUDI ILMU KEPERINTAHAN**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2017**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA  
UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPSI  
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN  
DESA (studi desa pendere saril kecamatan  
bebesen kabupaten aceh tengah)

NAMA : IWAN PURNAMA

NPM : 13.851.0007

PROGRAM STUDI : ILMU KEPERINTAHAN

Menyetujui

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs.H.Irwan Nasution MAP

Drs.M.Aswin Hasibuan MAP

Dekan



H. M. Arief Nasution MA

### LEMBAR PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iwan Purnama

Npm : 13 851 0007

menyatakan bahwa skripsi yang sama susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan belum pernah di ajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Adapun bagian -bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah di tulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Medan,

2017



Iwan Purnama

## ABSTRAK

Peranan, Peranan Kepala Desa yaitu mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan kegairahan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat merupakan suatu faktor yang sangat menentukan pembangunan yang ada di daerah kekuasaannya, demikian juga kedudukannya sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pemerintahan dalam pembangunan kemasyarakatan.

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang (yaitu pemimpin) untuk mempengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya). Sehingga orang lain tersebut bertindak-laku sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut.

Dalam mewujudkan visi dan misi desa yang di pimpin, kepala desa pendere saril mempunyai strategi dalam mewujudkan visinya yaitu dengan cara mengumpulkan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama dari setiap dusun yang ada di desa pendere saril, dan mengadakan musrenbang untuk menghalau kemiskinan berupa menempuh apa yang di rencanakan di dalam dusun tersebut, selain itu, demi masyarakatnya bapak abdul kadir menerima arahan dari bawahnya atau kemauan-kemauan masyarakatnya, setelah menemukan apa yang menjadi kemauan dari masyarakat, kemudian dari ke 3 (tiga) dusun tersebut hasil per dusun di rangkul, setelah itu memilah apa yang paling prioritas atau yang ter penting, dan yang paling utama di setiap dusun ada hak untuk mengenal, meminta dan mengajukan pendapat kepada kepala desa, kemudian setelah semuanya selesai lalu daftar kemauan tersebut dilibatkan kedalam RPJM.

Partisipasi, partisipasi yang di lakukan Di lingkungan masyarakat desa Pendere Saril kegiatan seperti gotongroyong itu berlaku pada hampir segala aktivitas dan berlaku di seluruh wilayah dalam desa Pendere Saril misalnya gerakan pekerjaan dalam hal pembangunan rumah, mesjid, pos, dan lain-lain.

***Kata kunci : Peranan, Kepemimpinan, Partisipasi.***

## ABSTRACT

The role, the role of the village chief that has the ability to regenerate the excitement of the people to participate in development. The ability to influence society is a crucial factor in the development of existing in the territory, as well as his position as head of government is responsible for the implementation of government in community development.

Leadership is the ability of a person (ie leader) to influence others (ie headed or followers). So that other people behave as desired by the leader.

In realizing the vision and mission of the villages in the lead, the village head pendere Saril have a strategy for achieving the vision, namely by collecting community leaders, young man and religious leaders from every hamlet in the village pendere Saril, and held musrenbang to banish poverty in the form of taking what which was planned in the village, in addition, for the sake of the people Mr. abdul kadir receive direction from subordinates or willingness-willingness of the people, after finding what the wishes of the community, then on to three (3) of the hamlet results per hamlets embraced, after sorting out what is most important priorities or the pitch, and the most important in every village there is a right to know, ask and submit opinions to the village head, then after everything is finished and the willingness to be involved into the list RPJM.

Participation, Participation will be undertaken in rural communities Pendere Saril environmental activities such as mutual cooperation was true of almost all activities and is valid throughout the territory of the village Pendere Saril for example the movement of work in the construction of homes, mosques, postal, and others.

***Keywords: Role, Leadership, Participation***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan khadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan proposal ini adalah **“PERANAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK DESA (studi desa pendere saril kecamatan bebesen kabupaten aceh tengah)”** merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata 1, di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan rasa bangga serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Arief Nasution MA., selaku Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
2. Bapak Drs. H. Irwan Nasution MAP, selaku Dosen Pembimbing I
3. Bapak Drs. M. Aswin Hasibuan MAP, selaku Dosen pembimbing II
4. Bapak Fernanda Putra A S.SOS.MA, selaku Sekretaris dalam penulisan proposal ini
5. Ayahanda, Ibunda, Kakanda, dan Adinda yang telah banyak memberikan dorongan moral maupun materil, serta motivasi dan semangat kepada penulis
6. Seluruh teman-teman dan adik-adik di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan proposal ini.
7. Rekan-rekan se-almamater

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan proposal ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran, maupun kritikan serta motivasi yang membangun agar dapat menjadi lebih baik lagi sehingga dapat bermanfaat bagi setiap pembaca.

Medan, 2017

Iwan Purnama

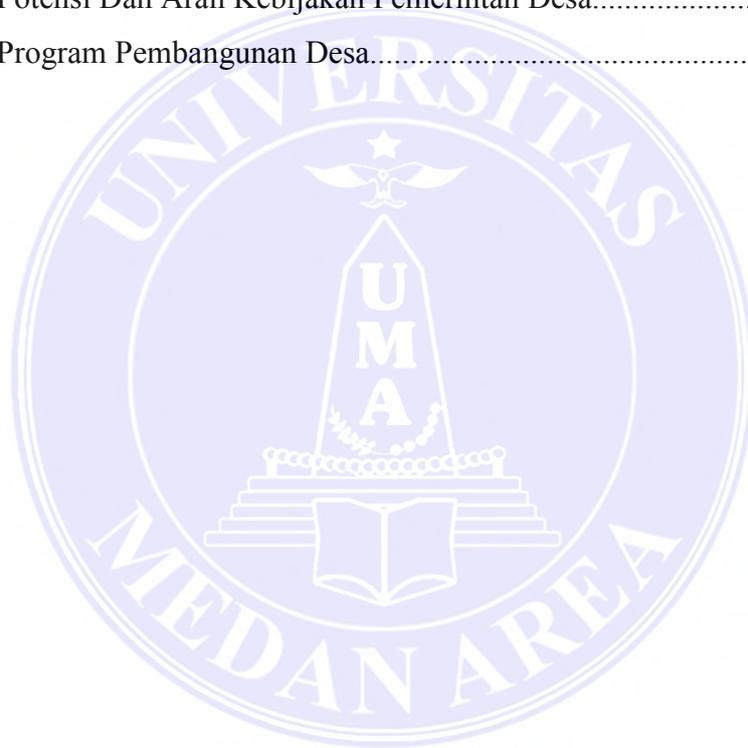
## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	4
1.3 Pembatasan Masalah.....	4
1.4 Rumusan Masalah .....	4
1.5 Tujuan Penelitian .....	5
1.6 Manfaat Penelitian .....	5
1.6.1 Manfaat Teoritis .....	5
1.6.2 Manfaat Praktis .....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
2.1 Kepemimpinan.....	6
2.2 Pengertian Kepemimpinan.....	7
2.3 Teori Kepemimpinan .....	11
2.4 Kepala Desa .....	12
2.5 Kepala Desa dan Peranannya.....	16
2.6 Tugas Kepala Desa Sebagai Pemimpin.....	19
2.7 Partisipasi Masyarakat.....	20
2.8 Pengertian Pembangunan.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Dasar dan Jenis Penelitian .....	26
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	26

3.3 Fokus Penelitian.....	27
3.4 Sumber data Penelitian .....	28
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	29
3.6 Validitas Data Penelitian.....	31
3.7 Metode Analisis Data.....	32
<b>BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
4.1 Sejarah Desa.....	34
4.2 Geografis.....	35
4.3 Keadaan Tanah.....	35
4.4 Demografi .....	35
4.5 Keadaan Ekonomi .....	37
4.6 Sarana Prasarana dan Infrastruktur .....	39
4.7 Admistrasi Pemerintah .....	39
4.8 Visi Dan Misi .....	40
4.9 Tujuan dan Saran Pembangunan Desa.....	41
4.10 Struktur Pemerintahan Desa Pendere Saril Kecamatan Bebesen.....	44
4.11 Analisis dan Evaluasi .....	45
4.12 Analisa Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Pendere Saril.....	51
4.13 Bentuk Partisipasi Yang Dilakukan Masyarakat Desa Pendere Saril .....	54
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>58</b>
A. KESIMPULAN.....	58
B. SARAN .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Demografi Desa Pendere saril.....	36
Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.....	36
Tabel 3 Keadaan Sosial Desa Pendere Saril.....	36
Tabel 4 Keadaan Ekonomi Desa Pendere Saril.....	38
Tabel 5 Saranana Dan Prasaranana Desa.....	39
Struktur Pemerintah Desa Pendere Saril Kecamatan Bebesen.....	44
Tabel 6 Potensi Dan Arah Kebijakan Pemerintah Desa.....	45
Tabel 7 Program Pembangunan Desa.....	50



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk lebih mempermudah pemahaman kita, maka akan di acuh suatu defenisi yang kiranya mampu menjadi landasan untuk membahas konsep kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut (bawahan) yang mengingatkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersamanya (Joseph C. Rost.,1993)

Seperti apa yang dihadapi oleh *corsair communication*, saat ini kenyataan yang di hadapi oleh orgaisasi dan kepemimpinan sangat banyak perbedaan dengan apa yang di hadapi beberapa dekan lalu. Saat ini pemimpin dan organisasi di hadapkan pada perubahan yang cepat, kompetisi yang ketat, globalisasi, perampingan organisasi, perubahan, ekonomi, sosial dan kondisi pemerintahan. Pemimpin dan organisasi dihadapkan pada tantangan yang lebih berat akibat kemajuan teknologi yang cepat, diregulasi, kebijakan pemerintah yang terbuka, sampai kompleknya masalah ketenagakerjaan.

Adapun perubahan paradigam yang muncul sehingga harus di adopsi oleh pemimpin dan organisasi (Daniel C. Kielson, 1996).

Desa patut di lindungi dan di jaga keasliannya yang mana adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesai. Dimana dalam berlangsungnya perkembangan desa tidak terlepas dari peran masyarakat serta kepemimpinan kepala Desa dan perangkat desa yang ada pada desa. Yang mana semua peran dari aparat pemerintah desa maupun masyarakat amat penting dalam proses pembangunan desa. Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, pengakuan terhadap masyarakat adat dipertegas melalui ketentuan dalam pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.(UU Desa no.6 tahun 2014).

Dalam proses pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 mengacu pada dua pola pendekatan yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa” yang mana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa merupakan suatu proses yang berlangsung di desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dalam konteks pembangunan, dalam pemerintahan Indonesia di canangkan berbagai program diantaranya seperti program inpres desa tertinggal, program pembangunan infrastruktur pedesaan, program alokasi dana desa, program PNPM dan sebagainya. Semua program khusus ini bertujuan untuk mempercepat upaya pembangunan di daerah pedesaan.

Dalam kajian ini penulis mengupas tentang hal-hal yang menjadi permasalahan di dalam pedesaan khususnya desa Pendere Saril yang mana di desa tersebut penulis melihat masih adanya pembangunan yang masih belum

terselesaikan , padahal pembangunan yang telah berjalan itu telah di mulai dari sejak lama, dan dalam skripsi ini penulis akan mengungkapkan apakah yang sebenarnya yang membuat beberapa pembangunan di desa tersebut belum terselesaikan hingga saat ini, apakah karena kurangnya partisipasi masyarakat di desa tersebut atau kah gaya kepemimpinan kepala desa yang masih kurang optimal.

Kepemimpinan merupakan sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan, untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka menyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta merasa tidak terpaksa. Kemampuan seseorang dalam memimpin juga sangat berpengaruh dalam proses pembangunan, yang mana dalam kepemimpinan Kepala Desa amat sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pembangunan di desa. Menurut Triantoro Safaria, (2004:100), menyatakan bahwa strategi implementasi kepemimpinan melalui mekanisme spesifik, teknik-teknik, alat-alat untuk mengarahkan sumber daya organisasi mencapai tujuan strategi dan dapat di capai secara efektif.

Dari latar belakang di atas maka penulis mengambil judul “ Peranan Kepemimpinan Kepala Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan fisik Desa (Studi Desa Pendere Saril, Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalahnya ialah :

- a. Bagaimana Kepimpinan kepala Desa Terhadap Pembangunan Desa Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah
- b. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.

## **1.3 Pembatasan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan juga perumusan yang telah diuraikan terdahulu maka perlu juga dilakukan pembatasan atas masalah yang diajukan agar tidak timbul penafsiran yang berbeda tentang batasan dari rumusan masalah yang diteliti maka dibatasi di Desa Pendere Saril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Dan studi ini hanya membahas kepemimpinan kepala desa serta partisipasi masyarakat Desa Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dan juga pembangunan fisik desa yang di butuhkan oleh masyarakat seperti pembangunan mesjid, jalan gang, jalan menuju mesjid, renase, serta infrastruktur-infrastruktur lainnya yang bersifat fisik.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Dari pembahasan latar belakang di atas, maka masalah yang akan diangkat adalah : “Bagaimanakah Implementasi Kepemimpinan kepala desa Terhadap partisipasi Masyarakat di Desa Desa Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah .

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Peran Kepimpina Kepala Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembagunan Desa. guna mengetahui pembangunan yang dilaksanakan di desa tersebut sudah di laksanakan sesuai atau belum dengan kondisi yang di butuhkan oleh masyarakat di desa Pendere Saril.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar S1 program studi Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Untuk dapat memperkaya konsep atau teori yang membantu perkembangan ilmu pengetahuan, pengalaman dan wawasan dalam kehidupan berpolitik, khususnya untuk mengembangkan pengetahuan ilmu Pemerintahan. Supaya dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

Dan agar dapat mengetahui keinginan masyarakat pendere saril juga dapat melihat apakah pembangunan yang di laksanakan bisa membawa manfaat kepada masyarakat, sehingga manfaat tersebut bisa di rasakan oleh masyarakat.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan atau konsep kepada para perangkat desa khususnya dalam pemerintahan dan kepada masyarakat umumnya dalam meningkatkan pengetahuan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kepemimpinan**

Kepemimpinan berasal dari perkataan pemimpin *Leader* yang mempunyai pengertian sebagai seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan di suatu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktifitas-aktifitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Kartono, Kartini (1990: 33). Jadi dengan kata lain pemimpin adalah seorang yang mempunyai kelebihan, sehingga dia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan, juga mendapatkan pengakuan serta dukungan dari bawahannya, sehingga dapat menggerakkan bawahannya kearah pencapaian tujuan tertentu.

Sementara kepemimpinan itu sendiri secara definisi adalah merupakan kegiatan yang mempengaruhi orang-orang agar bekerja sama untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Kartini, Kartono (1990: 38-39). Sedangkan menurut Stoner kepemimpinan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh kepada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya, Bukhori, Muhammad, dkk (2005: 73) Sehingga dapat bekerja lebih efektif dan efisien untuk mencapai angka produktifitas kerja sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh perusahaan Siswanto, Bedjo (2006: 310). Di lain pihak Gibson dkk, mendefinisikan kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut dengan penuh semangat berusaha mencapai tujuan, factor manusialah yang menggabungkan kelompok menjadi satu dan member motipasi kelompok itu menuju sasaran. Kegiatan manajemen seperti

merencanakan mengorganisasikan dan membuat keputusan adalah kepompong yang sedang tidur, sampai seorang pemimpin memicu kekuatan motivasi dalam diri orang-orang dan membimbing mereka ke arah sasaran, Gibson dkk (1997: 3) pekerjaan serta tanggung jawab atas kepemimpinannya tersebut dengan baik, Robert C. Miljus dalam bukunya *Human Relation On The Shop Floor* mengemukakan bahwa tanggung jawab seorang pemimpin adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan tujuan pelaksanaan kerja yang realistis (dalam artian kuantitas, kualitas, keamanan dan lain sebagainya).
- b. Melengkapi para karyawan dengan sumber dana yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
- c. Mengkomunikasikan kepada karyawannya tentang apa yang diharapkan dari mereka.
- d. Memberikan susunan hadiah yang sepadan untuk mendorong motivasi prestasi karyawannya.
- e. Mendelegasikan wewenang apabila diperlukan dan mengundang partisipasi apabila memungkinkan.
- f. Menghilangkan hambatan untuk pelaksanaan yang efektif.
- g. Menilai pelaksanaan pekerjaan dan mengkomunikasikan hasilnya.
- h. Menunjukkan perhatian kepada seluruh karyawannya.

## **2.2 Pengertian Kepemimpinan**

Kepemimpinan (*Leadership*) adalah kemampuan seseorang (yaitu pemimpin atau leader) untuk mempengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya). Sehingga orang lain tersebut bertingkah-laku sebagaimana kehendaki oleh pemimpin tersebut. Kadangkala dibedakan antara kepemimpinan

sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai suatu proses sosial (Koentjaraningrat, 1967:181). Sebagai kedudukan, kepemimpinan merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan. Sebagai salah satu proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau sesuatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat (Soerjono Soekanto, 1990: 318-319).

Menurut C.N. Cooley (1902), *The leader is always the nucleus of tendency, and on the other hand, all social movement, closely examined will be found to consist of tendencies having such nucleus*. Maksudnya, pemimpin itu selalu merupakan titik pusat dari suatu kecenderungan, dan pada kesempatan lain, semua gerakan sosial diamati secara cermat akan ditemukan kecenderungan yang memiliki titik pusat. Bagi setiap lembaga organisasi kepemimpinan yang efektif adalah merupakan kunci keberhasilan. Menurut Wahjosumijo (2003: 83) dalam praktek organisasi kata memimpin mengandung konotasi : “menggerakkan, mengarahkan, membina, melindungi, memberi teladan, memberikan dorongan, memberikan bantuan dan sebagainya”. Dari kata tersebut dapat dirumuskan memimpin mengandung makna yang luas yaitu “Kemampuan untuk menggerakkan segala sumber daya yang ada sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. Di lingkungan masyarakat, dalam organisasi formal maupu nonformal selalu ada seseorang yang dianggap lebih dari yang lain. Seseorang yang memiliki kemampuan lebih tersebut kemudian diangkat atau ditunjuk sebagai orang yang dipercayakan untuk mengatur orang lainnya. Biasanya orang seperti itu disebut pemimpin atau manajer. Dari kata itulah, kemudian muncul istilah kepemimpinan setelah melalui

proses yang panjang. Masalah kepemimpinan sama tuanya dengan sejarah manusia. Dalam kepemimpinan dibutuhkan manusia karena adanya keterbatasan dan kelebihan tertentu pada manusia. Apakah orang-orang dalam masyarakat atau organisasi tidak dapat menjalankan tugas atau fungsinya tanpa adanya seorang pemimpin? Pemimpin diperlukan, sedikitnya terdapat empat macam alasan: (a) karena banyak orang memerlukan figur pemimpin, (b) dalam beberapa situasi seorang pemimpin perlu tampil mewakili kelompoknya, (c) sebagai tempat pengambilan resiko bila terjadi tekanan terhadap kelompoknya dan (d) sebagai tempat untuk meletakkan kekuasaan.

Pengertian kepemimpinan bervariasi sebanyak orang yang mencoba mendefinisikan konsep mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, motivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerja sama kelompok, perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang luar kelompok atau organisasi. Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan sebagai sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu sukarela/sukacita. Ada beberapa faktor yang dapat menggerakkan orang yaitu karena ancaman, penghargaan, otoritas, dan bujukan. Kepemimpinan juga dikatakan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Tiga implikasi penting yang terkandung dalam hal yaitu: (1) kepemimpinan itu melibatkan orang

lain baik itu bawahan maupun pwngikut, (2) kepemimpinan melibatkan pen-  
distribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang,  
karena anggota kelompok bukanlah tanpa daya, (3) adanya kemampuan untuk  
menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi tingkah laku  
pengikutnta melalui berbagai cara.

Oleh karena itu, kepemimpinan itu pada hakikatnya adalah proses  
mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya dalam  
upaya mencapai tujuan oraganisasi, seni mempengaruhi dan mengarahkan orang  
dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan kerja sama yang  
bersemangat dalam mencapai tujuan bersama, kepemimpinan untuk  
mempengaruhi, memberi inspirasi dan mengarahkan tindakan seseorang atau  
kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan, melibatkan tiga hal yaitu,  
pemimpin, pengikut dan situasi tertentu, kemampuan untuk mempengaruhi  
suatu kelompok untuk mencapai tujuan dan sumber pengaruh dapat secara formal  
maupun tidak formal. Konsep kepemimpinan erat sekali hubungannya dengan  
kekuasaan pemimpin dalam memperoleh alat untuk memengaruhi perilaku para  
pengikutnya. Terdapat beberapa sumber dan bentuk kekuasaan yaitu kekuasaan  
paksaan, legitimasi, keahlian, penghargaan, referensi, informasi, dan hubungan.  
Pada dasarnya kemapan untuk memengaruhi orang atau suatu kelompok untuk  
mencapai tujuan tersebut ada unsur kekuasaan. Kekuasaan tak lain adalah  
kemampuan untuk memengaruhi orang lain untuk mau melakukan apa yag  
diinginkan oleh pihak lainnya. Praktik kepemimpinan berkaitan dengan  
mempengaruhi tingkah laku dan perasaan orang lain baik secara individual  
maupun kelompok dalam arahan tertentu, sehingga melalui kepemimpinan

merujuk pada proses untuk membantu mengarahkan dan memobilisasi orang atau ide-idenya.

Di dalam Islam kepemimpinan identik dengan istilah khalifah yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah Saw. wafat menyentuh juga maksud yang terkandung di dalam perkataan amir (yang jamaknya umara) atau penguasa. Oleh karena itu, kedua istilah ini dalam bahasa Indonesia disebut pemimpin formal.

### **2.3 Teori kepemimpinan**

Pada umumnya teori kepemimpinan berusaha untuk memberikan penjelasan mengenai pemimpin dengan mengemukakan beberapa segi, salah satunya adalah teori perilaku (behaviour theory). Teori ini bertolak dari pemikiran bahwa kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi tergantung pada perilaku atau gaya bersikap dan gaya bertindak seorang pemimpin. Dengan demikian teori ini memusatkan perhatiannya pada fungsi-fungsi kepemimpinannya. Gaya atau perilaku kepemimpinan tampak dari cara melakukan pengambilan keputusan, cara memerintah, memberikan tugas, cara berkomunikasi, cara mengendalikan dan mengawasi pekerjaan anggota organisasi, cara memimpin rapat dan cara pemberian sanksi/hukuman

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pendekatan teori perilaku melalui gaya kepemimpinan merupakan yang memiliki orientasi yang terdiri dari:

1. Orientasi pada tugas
2. Orientasi pada tugas dan barang

Balke dalam (Mawarni) menyimpulkan bahwa himpunan yang efektif atau yang mampu mengefektifkan dapat diwujudkan dengan kombinasi perilaku atau gaya kepemimpinan yang berorientasi pada pemerintah.

## **2.4 Kepala Desa**

Desa menurut definisi universal, adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat dirubah statusnya menjadi kelurahan. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD). Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab pada rakyat desa yang dalam tata cara prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada BPD, kepala desa wajib memberikan pelaporan pertanggung jawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya, namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggung jawaban tersebut. Kepala desa dipilih langsung melalui pemilihan kepala desa (pilkades) oleh penduduk desa tersebut.

Kewenangan kepala desa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina perekonomian desa.

7. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Menurut Ardiansyah (2013) dalam Penelitiannya yang berjudul Studi Tentang Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Muara Pasir Kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser, menyebutkan bahwa Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa adalah kemampuan dari seorang Kepala Desa untuk mempengaruhi masyarakat yang dipimpinnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan untuk melakukan suatu perubahan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan menuju arah yang lebih baik melalui kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya tugas dan kewajiban kepala desa yang sangat berat, maka sangat diperlukan persyaratan tertentu untuk menjadi kepala desa. Selain yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan juga yang diperlukan adanya kemampuan dalam menjalankan kepemimpinan yang diembannya.

Menurut Widagdo (2006) dalam Penelitiannya yang berjudul Kepala Desa dan Kepemimpinan Perdesaan: Persepsi Kader Posyandu di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, 2000, menyebutkan bahwa Peranan pemimpin atau Kepala Desa akan sangat penting apabila mereka aktif untuk mendatangi masyarakat, sering menghadiri pertemuan-pertemuan, dan dalam setiap kesempatan selalu menjelaskan manfaat program Posyandu. Para pimpinan

masyarakat ini aktif pula dalam mengajak warga masyarakat untuk mengelola kegiatan Posyandu. Apabila masyarakat melihat bahwa tokoh mereka yang disegani ikut serta dalam kegiatan tersebut, maka masyarakat pun akan tertarik untuk ikut serta.

Menurut Adnan (2011) dalam Penelitiannya yang berjudul Kajian Kepemimpinan Walikota Pekalongan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, menyebutkan bahwa Kepemimpinan seorang pemimpin dalam mengkomunikasikan visi dan misinya terhadap bawahan merupakan salah satu prasyarat keberhasilan manajerial pemimpin tersebut. Begitu pula dengan kepala daerah harus cakap dalam mengkomunikasikan visi dan misi agar dapat ditangkap oleh jajaran birokrasinya. Karena sebaik dan sesempurna apapun visi dan misi yang diemban seorang kepala daerah tetapi bila salah satu dalam memilih strategi komunikasi terhadap birokrasi yang dipimpinnya maka potensi untuk tidak terwujud akan menjadi lebih besar. Saat seperti inilah seni kepemimpinan seseorang kepala daerah diuji, yaitu bagaimana seorang kepala daerah dapat menggerakkan birokrasinya secara efektif dan efisien untuk mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan sendiri.

Dilihat dari penelitian yang sudah ada jelaslah bahwa kedudukan Kepala Desa sebagai pemimpin (leader) turut ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di desanya. Oleh karena itu, Kepala Desa dituntut harus mampu mengembangkan kepemimpinannya (leadership), mampu menggerakkan desanya, untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di desanya serta harus cakap dalam mewujudkan visi dan misi yang diembannya.

## **2.5 Kepala Desa dan Peranannya**

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa dan kepada Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan terhadap Desa diluar Desa gineologis yaitu Desa yang bersifat administratif seperti Desa yang dibentuk karena pemekaran Desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi Desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan Desa itu sendiri.

Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten / Kota yang diserahkan

pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten / Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diluar upah pungut, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan provinsi bersangkutan. Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan galian c dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

Dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan Desa pada khususnya merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilannya adalah peranan Kepala Desa dalam menjalankan roda Pemerintah. Hal ini erat kaitannya dengan pola kepemimpinan yang dijalankan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa bab IV paragraf 2

pasal 14 menyatakan bahwa Kepala Desa mempunyai peranan sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Untuk menjalankan tugas tersebut, maka Kepala Desa mempunyai fungsi yaitu:

1. Menggerakkan potensi masyarakat.
2. Melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya.
3. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Desa.
4. Melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kepala Desa mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan kegairahan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat merupakan suatu faktor yang sangat menentukan pembangunan yang ada di daerah kekuasaannya, demikian juga kedudukannya sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pemerintahan dalam pembangunan kemasyarakatan. Dalam hal ini melibatkan para pembantu-pembantunya dengan aktif sesuai dengan tugas masing-masing serta bagaimana memotivasi masyarakat agar mereka mau untuk berperan aktif secara terpadu bekerja sama antara Kepala Desa beserta mendayagunakan organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai fungsinya untuk mencapai hasil pembangunan yang telah diprogramkan.

Sebagai prinsip pembangunan Desa adalah dari, untuk, dan oleh rakyat, oleh karena itu hasilnya pun harus dinikmati oleh seluruh masyarakat. Selain itu

pembangunan Desa tidak dimaksudkan hanya untuk dinikmati oleh segelintir masyarakat dan juga bagaimana peranan Kepala Desa menggerakkan, memotivasi seluruh masyarakat untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses pembangunan. Hal ini bisa terwujud apabila seluruh lapisan masyarakat diikutsertakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan mengevaluasi kembali hasil pembangunan yang telah dicapai di dalam wilayahnya.

## **2.6 Tugas Kepala Desa Sebagai Pemimpin**

Berbicara tentang pemimpin, maka yang termasuk pemimpin bukan hanya semata-mata ditujukan kepada pemerintah saja, namun yang dikatakan sebagai pemimpin adalah semua orang-orang yang disertai tugas dan tanggung jawab seperti halnya bapak/ibu dalam rumah tanggapun juga disebut pemimpin. Kepala Desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, fungsi dan tanggung jawab. Dari penjelasan di atas maka Kepala Desa harus dapat menjalankan program pembangunan di Desanya jika dia memiliki sifat-sifat dan syarat sebagai seorang pemimpin. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Atmosudirdjo (2002: 212) bahwa seorang pemimpin harus memiliki 4 (empat) syarat pokok yaitu:

1. Pemimpin harus peka terhadap iklim lingkungannya, harus mendengarkan saran-saran dan pandangan-pandangan dari pada orang disekitarnya yang dia ketahui mempunyai banyak pengalamannya yang relevan dengan tugas yang dia emban.
2. Pemimpin harus menjadi teladan dalam lingkungannya, paling sedikitnya dia harus menyadari kekurangannya dan menjadi suri tauladan mengenai segala apa yang ia instruksikan kepada bawahannya.

3. Pemimpin harus bersikap dan bersifat setia kepada janjinya, setia kepada organisasinya, setia kepada atasannya, setia kepada bawahannya, setia kepada mission atau tugasnya serta setia kepada pemerintahannya dan sebagainya.
4. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan, artinya harus cakap, mampu, pandai mengambil keputusan setelah semua faktor yang relevan diperhitungkan.

Berdasarkan dari kutipan di atas, jelaslah kepemimpinan Kepala Desa sangat diharapkan oleh pemerintah sekarang seperti kepemimpinan yang Pancasila sejati, bukanlah kepemimpinan yang bersifat ogal-ogalan, akan mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat merusak. Untuk dapat mengusahakan orang lain bekerja sama dengannya, maka seorang pemimpin dapat menggunakan kewibawaan tertentu, atau diberikan wewenang formil tertentu. Hal ini memerlukan segi kepemimpinan yang sedikit berbeda dengan instansi lain karena kepemimpinan Kepala Desa harus peka terhadap segi politik masyarakat. Untuk menggerakkan hal-hal tersebut, maka kualitas kepemimpinan yang sedikit harmonis dalam birokrasi pemerintahan sangat diperlukan. Apalagi untuk tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan pembangunan dari pemerintahan yang bersifat baru.

## **2.7 Partisipasi Masyarakat**

Dikutip dalam buku Pemberdayaan Masyarakat karya Totok Mardikanto dan Poerwiki Soebiato, (2013), menurut Bornby partisipasi diartikan sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang

di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan atau profesinya sendiri (Theodorson, 1969). Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain (Raharjo, 1983).

Sedangkan menurut Beal (1964) partisipasi, khususnya partisipasi yang tumbuh karena pengaruh atau karena tumbuh adanya rangsangan dari luar, merupakan gejala yang dapat diindikasikan sebagai proses perubahan sosial yang eksogen. Sebagai suatu kegiatan, Verhangen (1979) menyatakan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat.

Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat mengenai (a) kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki, (b) kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri, (c) kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan, (d) adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Yadav (UNAPDI, 1980) Dikutip dalam buku Pemberdayaan Masyarakat karya Totok Mardikanto dan Poerwiki Soebiato, 2013, mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pemantuan dan evaluasi pembangunan, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk sumbangan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.
- c. Partisipasi dalam pemantuan dan evaluasi pembangunan kegiatan pemantuan dan evaluasi program diperlukan bukan hanya agar tujuannya dapat dicapai sesuai harapan namun juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.
- d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan Pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

## **2.8 Pengertian Pembangunan**

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu usaha perubahan untuk mengembangkan diri pada suatu keadaan dan sifat tradisional menuju kearah yang lebih baik, hal ini umumnya dikenal di negara-negara berkembang sebagai suatu proses perubahan sosial yang besar. Menurut siagian, (2006) bahwa proses pelaksanaan rangkaian kegiatan yang bersifat pertumbuhan dari perubahan berencana menuju mudernitas dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Bahwa sesuai dengan Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah no 43 tahun 2014, maka desa diwajibkan memiliki perencanaan yang di susun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka menengah kampung (RPJMK) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan rencana kerja pemerintah kampung (RKPK) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dari pengertian tersebut terkandung suatu maksud adanya usaha untuk mengembangkan dan memperbaharui yang sudah ada menjadi lebih baik, baik secara lahiriah maupun secara bathiniah kita ingin menikmati dan mengenyam hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Pembangunan merupakan cakupan yang luas dimana terdapat berbagai hambatan dan bukan dengan cara otomatis berjalan dengan sendirinya. Dalam bidang ekonomi harus ada kesempatan usaha yang dilakukan oleh pemerintah, koperasi dan swasta sebagaimana yang tertera dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan usaha yang baik, diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonmi yang menunjang pembengunan dibidang lainnya serta menciptakan lapangan kerja yang luas.

Pembangunan ke seluruh wilayah pada Negara Republik Indonesia maka perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pembangunan daerah dan pembangunan kelurahan yang lebih diarahkan pada perluasan kesempatan kerja serta peningkatan kemampuan penduduk untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dan menggulangi masalah yang ada. Pembangunan meliputi peningkatan pada kesejahteraan rakyat dimana pembangunan dilanjutkan pada kebijaksanaan yang berdasarkan Trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta stabilitas yang sehat dan dinamis. Dengan demikian pembangunan diprioritaskan pada bidang ekonomi yang harus didukung oleh ketertiban dengan kapasitas hukum, peningkatan kemampuan dan juga kewibawaan dari pada aparatur negara, pertumbuhan pada kreatifitas dan juga kegairahan kerja, partisipasi masyarakat, keamanan dan ketertiban umum, masalah pajak dan pola hidup sederhana. Dari uraian tersebut di atas, Suryadi (2000: 2) menyebutkan bahwa pembangunan masyarakat desa adalah suatu gerakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktif dan apabila mungkin didasarkan atas inisiatif masyarakat tetapi apabila inisiatif ini tidak datang maka di pergunakan teknik”untuk menimbulkan dan mendorongnya keluar dupaya kegiatan dan respon yang antusias terjamin.

Dari pendapat di atas dapat dilihat bahwa hal ini pembangunan itu meliputi pembangunan dalam arti material dan spiritual menyangkut berbagai dimensi hidup dan kehidupan masyarakat desa. Sering orang mengartikan pembangunan adalah sebagai keseluruhan usaha-usaha masyarakat tertentu yang menyangkut bidang fisik saja, misalnya mendirikan gedung, membuat jembatan dan sebagainya. Dan

hal ini tidak disalahkan juga tetapi bagi suatu Negara seperti Indonesia, pembangunan di bidang fisik hanyalah merupakan salah satu sisi atau bagian dari pembangunan Nasional. Sebab pembangunan Nasional beda hakekatnya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan baik yang menyangkut fisik maupun spiritual. Untuk menghindari adanya penafsiran yang keliru mengenai pembangunan, maka peneliti akan mengemukakan pendapat beberapa ahli antara lain Siagian (2000:2) mengartikan pembangunan ialah sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha atau pertumbuhan dan perubahan yang sederhana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara, dan Pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan Bangsa. Tjokroamidjojo (2001: 113) bahwa pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinue dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang lebih baik.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Dasar dan Jenis Penelitian**

Penelitian kualitatif itu berakar pada latar belakang alamiah sebagai kebutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induksi, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dari-dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak: peneliti dan subjek penelitian (Moleong, 2002 : 27).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Artinya data yang dianalisis berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka-angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif. Instrumen yang dipakai berbentuk: observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah Desa Pendere Saril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, Indonesia.

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan pada awal bulan November 2016 selama 3 bulan.

### 3.3 Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong atau tanpa adanya masalah, baik masalah-masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui kepustakaan ilmiah (Moleong, 2004:62).

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan apa yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif karena penelitian tidak dimulai dari sesuatu yang kosong tetapi diangkat dari permasalahan. Agar memudahkan usaha untuk mendapatkan jawaban atau permasalahan penelitian yakni “*Bagaimana Peranan Kepemimpinan Kepala Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik Desa di Desa Pendere Saril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah*”, maka yang menjadi fokus penelitian adalah:

- a. Peranan Kepemimpinan kepala desa untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa Pendere Saril. Bentuk kepemimpinan yang dimaksud adalah:
  1. Peranan Kepemimpinan Kepala Desa dalam penentuan arah, strategi dan cara memotivasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.
  2. Peranan Kepemimpinan Kepala Desa dalam memobilisasi sumber-sumber pembiayaan kepada masyarakat.
- b. Faktor penghambat dan pendukung dalam kepemimpinan Kepala Desa dalam pelaksanaan program pembangunan fisik desa dan pelayanan kepada masyarakat. Faktor penghambat itu meliputi: (1) Aspek Sosial (2) Aspek Budaya (3) Kondisi penduduk.

### 3.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat dari mana kita diperoleh, diambil dan dikumpulkan. Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara (responden, informan) dan observasi. Informan adalah sumber data yang berupa orang. Orang yang dalam penelitian ini dipilih dengan harapan dapat memberikan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau memperjelas jawaban dari responden. Dalam hal ini adalah Kepala Desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Pendere Saril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Dari beberapa informan dapat terungkap kata-kata dari tindakan yang diharapkan tentang kepemimpinan Kepala Desa serta Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik Desa dan apa hambatannya. Kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama (Moleong, 2000: 12).
- b. Data Sekunder yaitu data yang diambil dari dokumen dan laporan-laporan yang berkaitan langsung dengan penelitian. Dokumen adalah segala bentuk catatan tentang berbagai macam peristiwa atau keadaan di masa lalu yang memiliki nilai atau arti penting dan dapat berfungsi sebagai data penunjang dalam penelitian ini.

Dokumen ini ialah setiap bahan tertulis atau film. Sumber tertulis dapat terbagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi (Moleong, 2000: 160).

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Mengumpulkan data adalah aktifitas menjanging informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara (Sugiyono, 2010 : 137). Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *interview* (wawancara), *kuesioner* (angket), *observasi* (pengamatan), dan gabungan ketiganya. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Observasi

Metode observasi ini digunakan untuk mengetahui secara langsung aktifitas obyek yang sedang diteliti, selain itu observasi ini digunakan juga untuk mengambil data yang terkait dengan peranan kepemimpinan Kepala Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga peneliti dalam observasi ini akan mendapatkan data yang akan diolah dan dijadikan kesimpulan mengenai Peranan Kepemimpinan Kepala Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik Desa di Desa Pendere Saril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Teknik observasi digunakan untuk mengetahui peranan kepemimpinan Kepala Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik Desa serta dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, yaitu kepemimpinan Kepala Desa dalam penentuan arah, strategi dan memotivasi masyarakat serta dalam memobilisasi sumber-sumber pembiayaan kepada masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung pada responden. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2002 : 135). Ada dua macam jenis

wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, jawaban telah disiapkan sehingga tinggal mengkategorikan alternatif jawaban yang telah disediakan. Dalam wawancara tidak terstruktur, jawaban tidak perlu disiapkan sehingga bebas mengemukakan pendapatnya.

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara yang tidak terstruktur. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan seperti Kepala Desa sehingga peneliti mengetahui tentang kepemimpinan dan hambatan Kepala Desa, wawancara kepada perangkat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat desa untuk mengetahui lebih jelas mengenai Peranan Kepemimpinan Kepala Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik Desa di Desa Pendere Saril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Wawancara digunakan untuk mengungkapkan data tentang peranan kepemimpinan Kepala Desa dalam pelaksanaan program pembangunan serta pembangunan fisik desa dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam tahap ini wawancara dilakukan terhadap Kepala Desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, keluarga dan masyarakat Desa Pendere Saril.

### c. Dokumentasi

Penggunaan dokumentasi bertujuan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2002 : 2006).

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh fakta mengenai kebenaran yang valid. Karena objek yang menjadi sasaran penelitian dapat dipertanggung jawabkan dengan fakta yang ada.

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui data-data dari pemerintahan desa Pendere Saril dan memperoleh arsip-arsip dari kantor desa serta dokumen-dokumen dari desa. Selain itu dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan situasi nyata di tempat observasi dalam penelitian ini. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang ada di Desa Pendere Saril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, baik itu data penduduk, data sosial budaya, maupun data kondisi daerah. Data yang dikumpulkan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat apa yang terdapat di lapangan pada saat wawancara dan observasi.

### **3.6 Validitas Data Penelitian**

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuai dengan instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 2002 : 145).

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Lexy J. Moleong (2000) menjelaskan bahwa teknik triangulasi

adalah teknik pemeriksaan validitas data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dengan demikian, triangulasi merupakan sebuah pandangan yang bersifat multiperspektif. Denzin (dalam Moleong, 2002 : 178) menyatakan ada empat macam teknik triangulasi, yakni (1) triangulasi sumber, (2) triangulasi metode, (3) triangulasi penyidik, dan (4) triangulasi teoretis.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat, pandangan seperti rakyat biasa, pejabat pemerintah, orang yang berpendidikan, orang yang berbeda, (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan seperti dokumen tentang kepemimpinan kepala desa dan lain-lain.

### **3.7 Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu (Moleong, 2004: 3). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan hutan pada masyarakat adat sehingga digunakan

analisis interaktif fungsional yang berpangkal dari empat kegiatan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.
2. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesana pula akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
3. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa, mengatur, serta mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah tujuan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya merupakan validitasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Muhammad. 2011. *Kajian Kepemimpinan Walikota Pekalongan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*. Semarang: *Politika Jurnal Ilmu Politik Vol. 2, No. 2*
- Bukhori, Muhammad, dkk 2005. *Kepemimpinann*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kartono, Kartini. 2010. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Moleong, J. Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 *tentang Desa*.
- Rivai, Veithzal. 2006. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagan, Sondang P. 1980. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Triantoro Safaria. 2004. *kepemimpinan* . Yogyakarta: Graha Ilmu
- Surjadi. A. 1983. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Alumni. Bandung
- Trijono Lambang. 2007. *Pembangunan Sebagai Perdamaian*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Widagdo, Laksmono. 2006. *Kepala Desa dan Kepemimpinan Perdesaan: Persepsi Kader Posyandu Di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, 2000*. Semarang: *Makara, Kesehatan, Vol. 10, No. 2*
- Suharwo Hendro. 2010. *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa*
- Wirjana R. Bernadine, M.S.W dan Prof. Dr. Supardo Susilo, M.HUM. 2005. *Kepemimpinan (Dasar-dasar dan pengembangannya)*. Andi Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Desa Nomor.6 tahun 2014
- Nomor 32 tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*.

**INSTRUMEN PENELITIAN**  
**PERANAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA UNTUK**  
**MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM**  
**PEMBANGUNAN FISIK DESA (STUDI DESA PENDERE SARIL**  
**KECAMATAN BEBESAN KABUPATEN ACEH TENGAH)**

Pedoman Wawancara untuk Kepala Desa

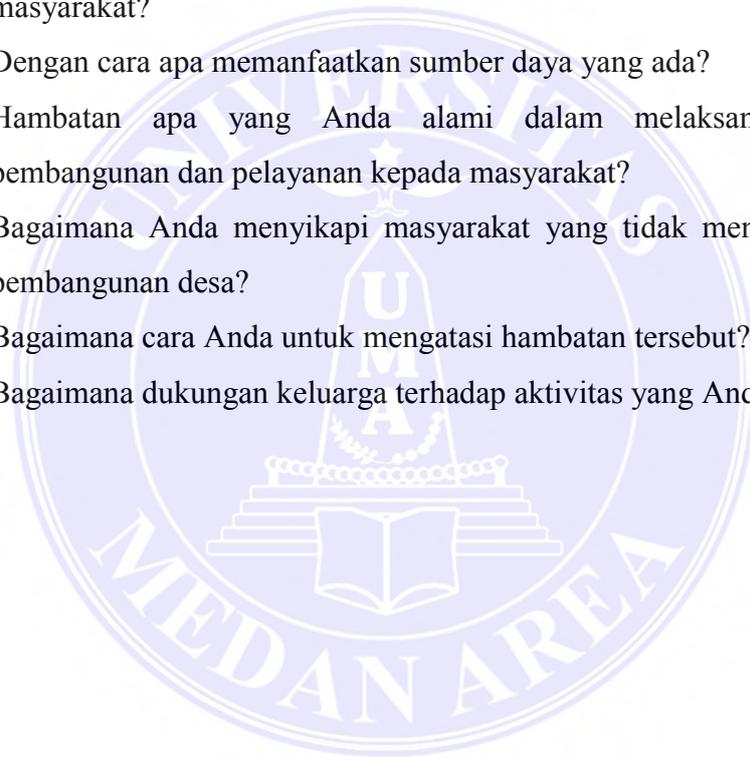
A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Alamat :
3. Umur :
4. Pekerjaan :

B. Daftar Pertanyaan

1. Sebagai seorang Pemimpin bagaimana strategi Anda untuk mewujudkan visi dan misi desa yang Anda pimpin?
2. Bagaimana cara Anda untuk menciptakan suasana yang harmonis dengan lingkungan masyarakat yang Anda pimpin?
3. Sebagai seorang pemimpin bagaimana cara Anda dalam memberikan motivasi pada masyarakat untuk mengikuti kegiatan pembangunan?
4. Bagaimana Anda mengoordinasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan?
5. Sebagai seorang pemimpin apakah selama Anda memimpin pernah mendapatkan kritik atau masukan dari bawahan anda? Kalau pernah dalam hal apa dan bagaimana anda menanggapi ktirik dan masukan tersebut?
6. Langkah apa yang Anda lakukan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat?
7. Apa saja program pembangunan yang ada di desa Pendere Saril?
8. Bagaimana pelaksanaan kegiatannya dalam pembangunan desa?
9. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa?

10. Sebagai seorang perempuan bagaimana cara Anda dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat?
11. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa Karas Kepoh?
12. Apa rencana Anda untuk perkembangan desa Karas Kepoh ke depan?
13. Potensi apa saja yang dimiliki oleh desa Karas Kepoh untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa?
14. Bagaimana cara memelihara potensi tersebut agar semakin berkembang?
15. Sumber daya utama apa yang diandalkan untuk menjamin penghidupan masyarakat?
16. Dengan cara apa memanfaatkan sumber daya yang ada?
17. Hambatan apa yang Anda alami dalam melaksanakan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat?
18. Bagaimana Anda menyikapi masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan pembangunan desa?
19. Bagaimana cara Anda untuk mengatasi hambatan tersebut?
20. Bagaimana dukungan keluarga terhadap aktivitas yang Anda lakukan?



**INSTRUMEN PENELITIAN**  
**PERANAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA UNTUK**  
**MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM**  
**PEMBANGUNAN FISIK DESA (STUDI DESA PENDERE SARIL**  
**KECAMATAN BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH**)

Pedoman Wawancara untuk Keluarga :

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Alamat :
3. Umur :
4. Pekerjaan :

B. Daftar Pertanyaan

1. Dukungan apa yang Anda berikan sewaktu calon pemimpin desa dalam pencalonan Kepala Desa?
2. Dukungan seperti apa yang Anda berikan selama calon pemimpin desa melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa?

**INSTRUMEN PENELITIAN**  
**PERANAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA UNTUK**  
**MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM**  
**PEMBANGUNAN FISIK DESA (STUDI DESA PENDERE SARIL**  
**KECAMATAN BEBESAN KABUPATEN ACEH TENGAH**)

Pedoman Wawancara untuk (Masyarakat, Tokoh masyarakat, Perangkat Desa)

**A. Identitas Informan**

1. Nama :
2. Alamat :
3. Umur :
4. Pekerjaan :

**B. Daftar Pertanyaan**

1. Bagaimana pendapat Anda terhadap kepemimpinan kepala desa?
2. Bagaimana pendapat Anda terhadap kegiatan yang dilaksanakan di desa?
3. Apakah Anda mengetahui program-program yang dibuat Kepala Desa?
4. Apakah Anda tidak khawatir pemerintahan desa berjalan tidak baik karena seorang pemimpin kepala desa yang sekarang dalam hal ini harus menjalankan tugasnya sebagai pemimpin?
5. Bagaimana kepemimpinan kepala desa selama ini?
6. Apa kepemimpinan kepala desa selama ini sudah membawa perubahan baik terhadap desa ini?
7. Sejauh mana kinerja pemimpin dalam melayani masyarakat?
8. Bagaimanakah pemimpin dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat selama ini?
9. Apakah dalam memberikan pelayanan publik ada membedakan masyarakat sesuai dengan golongan dan statusnya?



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolem Nomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 ☎ (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax: (061) 7366998 Medan 20223  
 Kampus II : Jalan Selebudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, ☎ (061) 8201984, Fax: (061) 8226331 Medan 20122  
 Website: www.uma.ac.id E-mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

### BERITA ACARA DAN NILAI SEMINAR HASIL PENELITIAN

Nomor : 075/FIS.1/01.7/II/2017

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **dua Puluh Empat** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** telah dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa Fakultas Isipol Universitas Medan Area :

Nama : Iwan Purnama  
 NPM : 138510007  
 Program Studi : Pemerintahan  
 Hari / Tanggal : Jum'at/24 Februari 2017  
 Waktu : 09.30 WIB s/d Selesai  
 Tempat : Ruang Seminar Fak.Isipol UMA  
 Judul Skripsi : Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi Desa Pendere Saril Kecamatan Bebesen Kabuten Aceh Tengah)

Tanda Tangan Pembawa Seminar :

Nilai Pembawa Seminar : 85 (A)

#### **Panitia Seminar Hasil :**

No	Jabatan	Nama Penguji	Tanda Tangan
1	Ketua	Drs. Irwan Nst, Spd, MAP	
2	Anggota	Drs. M. Aswin Hasibuan, MAP	

#### **Pembahas / Pembanding :**

No	Nama	NPM	Tanda Tangan
1	ISKANDAR MUDA	14.857.0008	
2	Dinilla Arifa	13.853.0035	
3	Iman Halakawa	13.853.0003	
4	Rini Suniani H	13.851.0017	
5	Afrijah Syams	13.963.0081	
6	Khaura Wahdani	13.851.0003	
7			
8			
9			
10			

Medan, 24 Februari 2017

Ketua Prodi Pemerintahan.

Mengesahkan  
 Dekan,  
 Prof. Dr. H. M. Arif Nasution, MA

Drs. H. Irwan Nst, SPd, MAP



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolem Nomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 III (061) 7366978, 7360168, 7364348, 7366781, Fax (061) 7366998 Medan 20223  
 Kampus II : Jalan Sejahtera Nomor 79 / Jalan SeSenayu Nomor 70 A, XII (061) 8201-94 Fax (061) 8226331 Medan 20122  
 Website: www.uma.ac.id E-mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

### BERITA ACARA DAN NILAI SEMINAR PROPOSAL

Nomor : 055/FIS.1/01.7/11/2016

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor 716/FIS.0/01.2/XI/2016 tertanggal 4 November 2016 tentang Seminar Kerangka Skripsi Maka Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sembilan** bulan **November** tahun **Dua Ribu Enam Belas** telah dilaksanakan Seminar Proposal Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area atas :

Nama : Iwan Purnama  
 NPM : 138510007  
 Program Studi : Pemerintahan  
 Hari / Tanggal : Rabu/9 November 2016  
 Waktu : 10.00 WIB s/d Selesai  
 Tempat : Ruang Seminar Fak. Isipol UMA  
 Judul Skripsi : Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Desa Pendere Saril. Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah)

Tanda Tangan Pembawa Seminar : ..... *B+ (78)*

Nilai Pembawa Seminar : ..... *B+ (78)*

**Panitia Seminar Hasil :**

No	Jabatan	Nama Penguji	Tanda Tangan
1	Ketua	Drs. H. Irwan Nst, SPd, MAP	
2	Anggota	Drs. M. Aswin Hasibuan, MAP	
3	Sekretaris	Fernanda P. Adela S.Sos, MA	

**Pembahas / Pembanding :**

No	Nama	NPM	Tanda Tangan
1	SUGRANTO	13.853.0007	
2	YUYUN ARNIEG	13.851.0001	
3	Adi Haidara	13.851.0011	
4	AFFINIA SARA	13.851.0011	
5	TOHONG PAULIA	13.851.0020	
6			
7			
8			
9			
10			

Mengesahkan  
 Dekan,  
 Universitas Medan Area  
 Prof. Dr. H. M. Arif Nasution, MA

Medan, 4 November 2016  
 Ketua Prodi Pemerintahan  
  
 Drs. H. Irwan Nst, SPd, MAP



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7365781, Fax. (061) 7366998 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, (061) 8201994, Fax. (061) 8226331 Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 740/FIS.1/01.10/XI/2016  
Lamp : -  
Hal : Pengambilan Data/Riset

14 Nopember 2016

Yth, Ka. Desa Pendere Saril  
Kecamatan Bebesen

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Iwan Purnama  
N P M : 138510007  
Program Studi : Pemerintahan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset ke Kantor Desa Pendere Saril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, dengan judul Skripsi "**Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi Desa Pendere Saril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah)**"

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
Drs. Irena Muda, MAP

CC : File,-



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
KECAMATAN BEBESEN  
**KAMPUNG PENDERE SARIL**

Jalan Takengon- Isaq KM. 4 Temung Penanti

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

NO : 9 / POS / AT / 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDUL KADIR**  
Jabatan : Kepala Desa Pendere Saril  
Alamat : Pendere Saril

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Iwan Purnama  
NIM : 138510007  
Fakultas : Isipol  
Jurusan : Studi Kepemerintahan  
Universitas : Universitas Medan Area (UMA)

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Pendere Saril Kec, Bebesen Kab, Aceh Tengah selama 1(satu) bulan, 16 (enam belas) hari, terhitung mulai tanggal 15 November 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“PERANAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYRKAAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK DESA (STUDI DESA PENDERE SARIL KECAMATAN BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya

Pendere saril, 31Desember 2016

Kepala Desa Pendere Saril

  
**ABDUL KADIR**